

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dengan bekerja setiap manusia akan memperoleh sesuatu yang diinginkan, mengenai kewajiban bekerja telah dijelaskan melalui firman Allah SWT :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya : “*dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.* (QS. Al-Isra : 31)¹

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan pokok yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Banten pada khususnya. Untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan diperlukan data kemiskinan yang menyeluruh.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten sejak tahun 2007 telah merilis tingkat kemiskinan makro provinsi keadaan bulan Maret tahun yang bersangkutan. Mulai tahun 2011, BPS Provinsi Banten merilis tingkat kemiskinan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu keadaan bulan Maret dan bulan September. Sejak tahun 2014, untuk melengkapi ulasan yang disajikan pada Berita Resmi Statistik (BRS),

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Hikmah, 2008), h. 121

BPS Provinsi Banten menyusun laporan eksekutif yang mengupas lebih dalam data kemiskinan. Laporan eksekutif BRS kemiskinan keadaan September 2015 disajikan dalam bentuk publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2015.”²

Sebagai permasalahan global, kemiskinan menjadi perhatian seluruh bangsa di dunia. Salah satu kesepakatan bangsa-bangsa di dunia tentang kemiskinan tercantum dalam Millennium Development Goals (MDGs) poin pertama yaitu mengurangi angka kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015. Pencapaian MDGs dapat dipantau dari angka kemiskinan yang dihitung di setiap Negara. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan suatu konsep kemiskinan yang jelas. Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan standar kehidupan minimum. Konsep yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari. Pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari dihitung berdasarkan 1 basket komoditi yang terdiri dari 52 jenis komoditi. Penghitungan yang didasarkan pada hasil survei menyebabkan angka kemiskinan yang dihitung dengan GK hanya

² Badan Pusat Statistik-Provinsi Banten *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2013* (Banten,2013) 1

bersifat estimasi atau disebut sebagai data makro. Data kemiskinan makro tidak dapat memberikan informasi siapa dan dimana penduduk miskin itu berada. Data kemiskinan makro digunakan untuk : (1) mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, (2) membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah, dan (3) menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.³

Tingkat kemiskinan Banten cukup rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada September 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tercatat sebesar 5,75 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 690,67 ribu jiwa. Secara nasional, tingkat kemiskinan Banten berada pada posisi terendah kelima setelah DKI Jakarta (3,6%), Bangka Belitung (4,83%), Kalimantan Selatan (4,72%) dan Bali (5,25%). Rendahnya tingkat kemiskinan di Banten bukan berarti masalah kemiskinan tidak menjadi prioritas utama. Pengentasan kemiskinan tetap menjadi program prioritas, karena hidup yang layak menjadi hak semua orang dan hal ini yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Namun Maret 2013, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan. Angka kemiskinan naik dari 5,71 persen pada September 2012 menjadi 5,74 persen pada Maret 2013. Sementara itu jumlah penduduk miskin meningkat dari 642,88 ribu jiwa menjadi 652,36 ribu jiwa pada periode yang sama.⁴ Kemiskinan pada bulan Maret 2014 menunjukkan penurunan yang cukup menggembirakan. Jumlah

³ Badan Pusat Statistik-Provinsi Banten , *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2013* (Banten,2013) 2

⁴ Badan Pusat Statistik-Provinsi Banten *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2015* (Banten,2015) 3

penduduk miskin mencapai 622,84 ribu orang (5,35 persen), berkurang 54,67 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013. Namun pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu mencapai 649,19 ribu orang (5,51 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014, maka selama enam bulan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 26,35 ribu orang (4,23 persen). Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin Banten kembali meningkat mencapai 702,40 ribu orang (5,90 persen), atau bertambah 53,21 ribu orang (8,20 persen). Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin di daerah perkotaan maupun perdesaan, keduanya mengalami peningkatan. Penduduk miskin di perkotaan bertambah sebesar 27,35 ribu dan di perdesaan bertambah sebesar 25,86 ribu orang.⁵

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak

⁵ Badan Pusat Statistik-Provinsi Banten , *Laporan Eksekutif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten September 2015* (Banten,2015) 6

faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.⁶

Jadi, jelas bahwa tiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM di suatu provinsi akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di provinsi tersebut. Dalam perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.⁷

B. Identifikasi Masalah

Dari hasil pemaparan yang telah diuraikan, terdapat identifikasi masalah yang perlu dikaji dalam pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Identifikasi masalah tersebut adalah

⁶ <http://banten.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>, 12:46 WIB

⁷ Tulus T.H. Tambunan *Perekonomian Indonesia* (Jakarta, Ghalia Indonesia 2003) 167

menganalisis adakah pengaruh dan seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2011-2014.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2011-2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Banten?
2. Seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Banten.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Jadi manfaatnya bagi penulis agar bisa lulus sarjana.

2. Bagi Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

3. Bagi akademisi

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan.

G. Hipotesis

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

Ho: Diduga tidak ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.

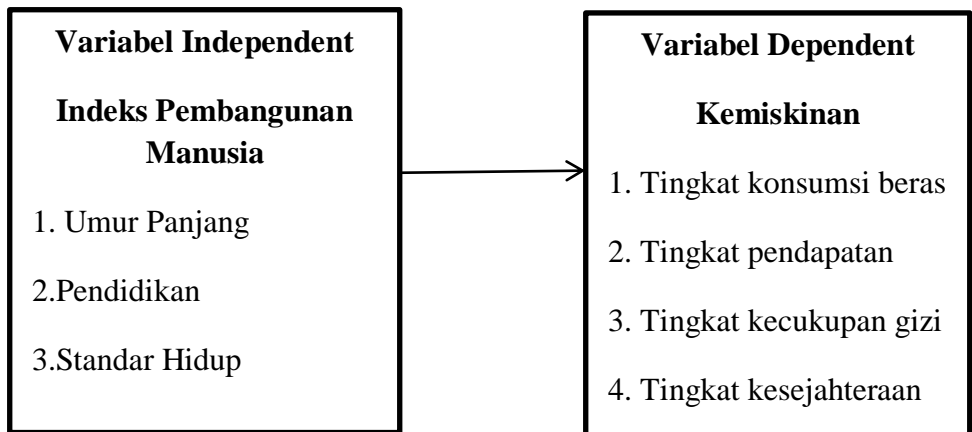
Ha: Diduga ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.

Dengan dugaan sementara apabila ada pengaruh, maka jika jumlah IPM tinggi maka akan meningkat pula kemiskinan. dan jika

jumlah IPM meningkat tetapi tidak dengan kemiskinan maka tidak ada pengaruh.

H. Kerangka Berpikir

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Dalam teori Dr. Bambang Rustanto mengenai kemiskinan dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini :

1. Perspektif patologi social (Durkheim)

Kemiskinan dipandang sebagai penyakit social, di mana orang gagal berfungsi social dalam peran yang diharapkan struktur sosial yang terus berubah sehingga tertekan oleh struktur yang lain. Orang-orang menjadi miskin karena gagal mengikuti atau gagal beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah tersebut sehingga mengganggu keberfungsian, seperti akses akan informasi terbatas, tidak mampu mengikuti pendidikan, hubungan sosialnya terbatas. Hal inilah yang membuat orang tetap menjadi miskin karena kalah bersaing (disfungsi).

2. Perspektif disorganisasi sosial/disintegrasi sosial (parson)

Kemiskinan disebabkan kesalahan dalam aturan, salah mengorganisasi serta kebijakan yang tidak memihak pada orang miskin akibat dari penyelewengan institusi karena kurangnya control sosial. Disorganisasi terjadi ketika masyarakat seluruh/sebagiannya mengalami ketidaksempurnaan dalam mengorganisasi /mengintegrasikan tujuan, harapan-harapan, dan aturan-aturan serta tidak menjaga stabilitas atau keseimbangan. Hal ini mungkin terjadi Karen perubahan begitu cepat dan orang tidak mampu mengikutinya, sehingga kemungkinan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat dan orang-orang miskin tetap miskin dan yang kaya tetap kaya.

3. Perspektif penyimpangan perilaku

Berkaitan dengan patologi sosial, perspektif ini menimbulkan orang berontak dan melakukan penyimpangan sebagai wujud perlawanan daan mencari perhatian untuk menyesuaikan diri dengan siyuasi sosial. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan harapan-harapan yang dimiliki oleh seseorang dengan nilai-nilai dan harapan-harapan kelompok/masyarakat tempat ia tinggal sehingga ia berprilaku menyimpang. Prilaku menyimpang tersebut yang menyebabkan ia tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan yang terdapat pda masyarakat tempat ia beraada, sehingga ia miskin.

Dalam pandangan teori ini, kemiskinan diakibatkan oleh ketidakberfungsian sistem. Menurut para penganut fungsional, cara

terbaik untuk menyelesaikan kemiskinan adalah dengan cara penyesuaian untuk memperbaiki ketidakberfungsian tersebut.⁸

Dua elemen penting yang di tekankan pada teori ini ialah *partisipasi (participation)* dan *pemberdayaan (empowerment)*. Dari sinilah kemudian memunculkan teori tentang *empowerment* yang di pandang sebagai pemaknaan alternative terhadap pembangunan. Pencapaian dan elemen dalam *people centred*, disebutkan oleh **Dudley Seers (1979)**, ada delapan (8) kondisi utama yang harus dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Rendahnya kemiskinan
- 2) Rendahnya pengangguran
- 3) Relative ada kesetaraan
- 4) Demokratisasi dalam kehidupan politik
- 5) Kemerdekaan nasional yang sesungguhnya
- 6) Baiknya tingkat pendidikan masyarakat
- 7) Status perempuan yang relatif setara dengan laki-laki dan partisipasi perempuan
- 8) Keberlanjutan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq, 1985). Pengertian ini mempunyai dua sisi yaitu:

Pertama, pembentukan kemampuan manusia seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat; Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dipunyai untuk bekerja, untuk

⁸ Bambang Rustanto, *Mengenai Kemiskinan*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,2015)

menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial, dan politik.⁹

Menurut Rasidin K dan Bonar M 2004, indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut dan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Karna rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab ke – satu tentang pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, Hipotesis, Kerangka berpikir, Sistematika pembahasan.

Bab ke – dua tentang kajian teori, yang menguraikan pengertian Kemiskinan, Faktor-faktor penyebab kemiskinan, ukuran kemiskinan, indikator kemiskinan, pengertian indeks pembangunan manusia, komponen indeks pembangunan manusia, hubungan antar variabel.

⁹ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung, ALFABETA 2012) 20

Bab ke – tiga tentang metode penelitian, yang menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, operasional variabel penelitian, alur penelitian.

Bab ke – empat tentang pembahasan dan hasil penelitian, yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, indeks pembangunan manusia, kemiskinan, hasil uji hipotesis penelitian, hasil pengujian statistik uji normalitas, hasil uji autokorelasi, hasil uji heteroskedastisitas, hasil uji regresi sederhana, hasil pengujian Uji t, hasil analisis koefisien determinasi.

Bab ke – lima tentang penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran